

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lainnya :

- Alfi. (2021, 03 18). *Wisata Religi Jadi Primadona, Pengrajin Kaligrafi Cuan Ratusan Juta*. Diambil kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5498375/wisata-religi-jadi-primadona-perajin-kaligrafi-cuan-ratusan-juta>
- Ardiansyah, & Gunawan, B. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak, dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. *Badan Kebijakan Fiskal*, No. 1.
- BPS Kabupaten Demak. (2015). *Banyaknya Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Demak Tahun 2015*. Demak: Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
- Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering work through information technology*. Harvard Business School Press.
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Harper Business.
- Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. (2021). *Alhamdulillah Ada Kabar Baik di Tengah Pandemi! Ekspor Mebel dan Kerajinan Tembus Rp23,5 Triliun, Tertinggi ke AS*. Jakarta: INDUSTRY.co.id.
- Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. (2021). *Edmund Parengkuan Terpilih Jadi Ketua HIMKI Jabodetabek : Potensi Pasar Mebel dan Kerajinan Sangat Besar*. Jakarta: Jakarta-Maritim.

- Howkins. (2011). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya Penerapan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan. (2020, Januari 1). *Memahami Tax Gap*. Dipetik Januari 22, 2022, dari [Kemenkeu.go.id: https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-memahami-tax-gap-2020-01-09-6bfb976f/)
- Kementerian Keuangan RI. (2021, 09 27). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Dipetik 02 18, 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- Kusumawardani, & Rum. (2020). Industrial Growth and Environmental Resource toward of the Tax Potential: A Case Study in Shouth Sulawesi Province. 201-209.
- Lemanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. HM.4.6/203/SET.M.EKON.3/05/2021 (hal. 1). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Madji. (2007). *Upaya Pengembangan Potensi Pariwisata di Indonesia*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, & Anwar. (2017). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan dan Bisnis)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prihadhi, & Endra. (2004). *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

- Puspitasari, & Ngadiman. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010 - 2012. *Jurnal Akuntansi*, 408 - 421.
- Rohmad, S. (1985). Pembaharuan Perpajakan Ditinjau dari Segi Hukum. *Prisma*, No. 4.
- Shalehah. (2019). Analisis Penerapan Self Assessment System Terkait Penghindaran Pajak di KPP Madya Sidoarjo. 20.
- Thuronyi, V. (2003). *Comparative Tax Law*. Hague: Martinus Nijhoff.
- Universitas Diponegoro. (t.thn.). *BAB II*. Dipetik Februari 28, 2022, dari eprints.undip.ac.id: http://eprints.undip.ac.id/59542/2/BAB_II.pdf
- Whittenburg, Gerald, & Altus-Buller. (2011). *Income Tax Fundamental*. Mason : South-Western Cengage Learning.
- Wiyono. (2006). *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.
- Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan :
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.